

**PROPOSAL PENELITIAN PENGEMBANGAN KEILMUAN GURU BESAR
TAHUN ANGGARAN 2010**

**JUDUL PENELITIAN:
ANALISIS KESETARAAN GENDER
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN DIY**



Oleh:

Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si

Lutfi Wibawa, M.Pd

**FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA
2010**

A. JUDUL :

Analisis Kesetaraan Gender Di Pemerintahan Kabupaten Sleman DIY

B. ABSTRAK

**ANALISIS KESETARAAN GENDER
DI PEMERINTAHAN KABUPATEN SLEMAN DIY**

Oleh: Farida Hanum, dkk
FIP-UNY

Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan kepada semua kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan PUG dari tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi), atas kebijakan dan program pembangunan nasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Tujuannya agar kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan di Indonesia dapat tercapai.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hasil yang sudah dicapai Pemerintah Kabupaten Sleman dalam Kesetaraan Gender melalui data statistik terakhir. Penelitian ini memfokuskan pada data tentang aparat pemerintahan yang meliputi jenis kelamin, tingkat kepemimpinan dan jabatan Struktural. Selain itu juga mengenai kependudukan yang meliputi ekonomi, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran. Kemudian data mengenai bidang sosial antara lain yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan.

Penelitian ini menggunakan Analisis Gender guna memperoleh data terpilah yang kemudian akan di interprestasi untuk melihat seberapajauhkah kesetaraan gender telah tercapai di Pemerintah Kabupaten Sleman DIY. Hasil penelitian sangat bermanfaat menambah konsep untuk mata kuliah Sosiologi Gender yang dipelajari di Program Studi Pendidikan Sosiologi FISE dan mata kuliah Gender dan Pendidikan di Program Studi Analisis Kebijakan Pendidikan (AKP) di FIP UNY. Selain itu hasil penelitian ini bermanfaat sebagai informasi untuk Pemerintah Kabupaten Sleman dalam membuat kebijakan dan Program ke depan.

Kata Kunci: Analisis gender, Kesetaraan gender, Pemerintahan Kabupaten Sleman

C. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Kajian gender di Universitas Negeri Yogyakarta dipelajari secara formal pada mata kuliah Sosiologi Gender di Program Studi Pendidikan Sosiologi FISE UNY serta mata kuliah Gender dan Pendidikan di Program Studi Analisis Kebijakan Pendidikan (AKP) di FIP UNY. Untuk dapat menambah materi perkuliahan yang berasal dari hasil-hasil research maka penelitian yang berkaitan dengan dinamika masyarakat khususnya yang mengenai kesetaraan gender harus terus dilakukan, untuk memperoleh data akurat dari perkembangan riil yang ada di masyarakat.

Salah satu tujuan pembangunan di Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera tanpa membedakan laki-laki atau perempuan. Meskipun telah banyak kemajuan pembangunan yang dicapai, namun kenyataan menunjukkan bahwa kesenjangan gender (gender gap) masih terjadi pada sebagian besar bidang pembangunan, terutama bidang pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Isu kesenjangan gender inilah yang membatasi keterlibatan kaum perempuan dalam pembangunan dan berdampak terhadap pencapaian kualitas hidupnya. Apabila dibandingkan dengan Negara-negara ASEAN yang lain, kualitas SDM Indonesia tampak masih tertinggal dari Philipina, Thailand, Malaysia, dan Singapura. Pada tahun 2007 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia adalah peringkat ke 108 dari 177 negara, sementara Indeks Pembangunan Gender peringkat ke 81 dari 136 negara dan Indeks Pemberdayaan Gender adalah 58,9% hampir sejajar dengan Negara-negara LAOS, Kamboja dan Myanmar (Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan RI, 2003).

Untuk mengejar ketertinggalan itu maka pembangunan Indonesia harus dilakukan dalam perspektif pembangunan berwawasan gender, dimana perempuan dan laki-laki sebagai anggota masyarakat mempunyai kedudukan dan hak yang sama atas akses, manfaat, partisipasi dan kontrol dalam pembangunan. Ukuran keberhasilan pembangunan sumber daya manusia dapat diketahui melalui tiga indikator pencapaian pembangunan yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IPG). IPM merupakan indikator komposit dengan beberapa variable utama yaitu pendidikan, kesehatan dan ekonomi. IPG mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dengan melihat ketimpangan dan mengakomodasi perbedaan pencapaian antara laki-laki dan perempuan. Sedangkan IGD mengukur ada tidaknya ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan.

Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional menginstruksikan kepada semua kementerian dan lembaga pemerintah, pemerintah propinsi, dan kabupaten/kota untuk melaksanakan PUG dari tahapan perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan (monitoring) dan penilaian (evaluasi), atas kebijakan dan program pembangunan nasional sesuai dengan bidang tugas dan fungsi, serta kewenangan masing-masing. Tujuan Pelaksanaan strategi PUG antara lain agar semua komponen masyarakat mendapatkan manfaat yang sama dari pembangunan, memperoleh akses, partisipasi dan kontrol yang setara antara laki-laki dan perempuan, serta kelompok-kelompok yang rentan dan selama ini termarjinalkan dalam pembangunan. Tujuan lainnya agar kesenjangan gender di berbagai bidang pembangunan dapat dikurangi melalui kebijakan/program/kegiatan yang merespon pengalaman, aspirasi dan permasalahan yang dihadapi, baik oleh laki-laki maupun perempuan karena adanya peran gender dalam keluarga-keluarga masyarakat. Akuntabilitas dari tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan terwujudnya keadilan dan kesetaraan gender juga diharapkan dapat terwujud dengan melaksanakan PUG secara konsisten.

Untuk mendukung pelaksanaan PUG tersebut Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan (KNPP) melakukan fasilitasi, advokasi, sosialisasi, penyediaan bahan dan data, pelatihan gender kepada kementerian/lembaga (K/L), pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dengan demikian diharapkan tersedia sumberdaya manusia yang terampil dan mampu mengintegrasikan isu gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Berbagai upaya yang dilakukan KNPP telah menunjukkan hasil yang positif seiring dengan dengan semakin terbukanya wawasan gender para pemangku kepentingan pada semua level, dan dibentuknya lembaga pelaksanaan PUG, dalam bentuk kelompok kerja PUG maupun focal point PUG pada K/L, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa PUG semakin bergerak maju seiring dengan menguatnya komitmen dan kesadaran gender semua lapisan penentu dan pelaksana kebijakan di tingkat nasional, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.

Namun demikian, kita masih menghadapi tantangan dalam pelaksanaannya, antara lain masih terjadi perbedaan intensitas dan ekstensitas dalam mengarusutamakan gender ke dalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di K/L, provinsi, kabupaten/kota sehingga bias gender maupun netral gender masih mewarnai beberapa dimensi pembangunan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh terbatasnya kualitas sumberdaya manusia untuk melakukan analisis gender dan mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, serta kurangnya komitmen para pemimpin K/L pemerintah dan daerah dalam pelaksanaan PUG. Untuk mengatasi hal itu maka KNPP melakukan berbagai terobosan untuk memfasilitasi melembaganya pelaksanaan PUG di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota melalui berbagai pembangunan kapasitas pelatihan untuk pelatih. Terobosan lain yang dilakukan KNPP adalah memprakarsai suatu inisiatif untuk memotivasi dan menghargai para pemangku kepentingan melalui pemberian Anugerah Parahita Ekrapraya (APE) kepada kementerian/lembaga, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota yang telah berhasil mengintegrasikan berbagai isu gender kedalam kebijakan pembangunan pemerintah, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota. Pemberian APE dilakukan sejak Tahun 2004.

Pengarus Utamaan Gender (PUG) adalah suatu strategi penilaian dari setiap rencana aksi bagi perempuan dan laki-laki mencakup peraturan, kebijakan atau program pada seluruh bidang disemua tingkatan (Dewan Ekonomi PBB, 1997). Sejak diterbitkannya Inpres Nomor 9 tahun 2000, banyak cara-cara yang sudah ditempuh oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk meningkatkan kesadaran dan kepekaan gender dalam program-programnya, khususnya di lingkungan wilayahnya. Kebijakan-kebijakan yang ada telah banyak berorientasi pada Pengarus Utamaan Gender (PUG), sehingga cukup banyak pula penyempurnaan atau perubahan aturan-aturan perundangan di daerah yang tidak bias gender dan mengandung diskriminasi pada perempuan. Hal ini dilaksanakan guna meningkatkan kedudukan dan peran perempuan diberbagai bidang kehidupan.

Pemerintah Kabupaten Sleman yang lokasinya sangat dekat dengan berbagai Perguruan Tinggi dan selalu bermitra dengan Perguruan Tinggi dalam memecahkan masalah, diduga telah banyak melaksanakan kebijakan yang berorientasi pada Pengarus Utamaan Gender untuk membuktikan dugaan tersebut maka penelitian ini dilakukan.

Penelitian ini akan memakai data-data sekunder yang akan di analisis untuk memperoleh informasi dan fakta tentang kesetaraan gender pada aparat pemerintahan Kabupaten Sleman. Sejauhmana kesetaraan gender terdapat pada lingkungan aparat pemerintahan dan pada bagian-bagian mana yang masih menggambarkan bias gender.

Hasil penelitian ini sangat bermanfaat untuk menambah konsep-konsep tentang gender dan dinamikanya, khususnya untuk materi perkuliahan sosiologi gender serta gender dan pendidikan. Seberapa jauhkan capaian kesetaraan gender di masyarakat dan apakah kebijakan kebijakan Pengarus Utama gender (PUG) telah terimplementasi di masyarakat khususnya pada aparatur pemerintah daerah sebagai lembaga pelayanan masyarakat. Selain itu berbagai himbauan sering diberikan pada para dosen untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dengan hasil-hasil research agar fakta dan konsep yang diberikan merupakan hasil kajian ilmiah. Oleh karena itu maka penelitian ini sangat penting untuk dilaksanakan.

2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka pada penelitian ini dirumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah gambaran kesetaraan gender pada komposisi aparat pemerintahan daerah yang meliputi jenis kelamin, penduduk dan jabatan struktural
- b. Bagaimanakah gambaran kesetaraan gender pada kependudukan yang meliputi ekonomi, partisipasi angkatan kerja dan pengangguran
- c. Bagaimanakah gambaran kesetaraan gender pada bidang sosial yang meliputi pendidikan dan kesehatan

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk memperoleh informasi tentang kesetaraan gender pada aparat pemerintahan Kabupaten Sleman yang meliputi komposisi jenis kelamin; tingkat pendidikan; yang menjabat jabatan struktural eselon 2, 3 dan 4
- b. Untuk memperoleh informasi tentang kesetaraan gender pada kependudukan yang meliputi Ekonomi, Partisipasi Angkatan Kerja dan pengangguran
- c. Untuk mendapat informasi tentang kesetaraan gender pada bidang sosial yang meliputi pendidikan dan kesehatan

4. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini bermanfaat menambah konsep tentang kesetaraan gender yang berasal dari kondisi riil di masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk bahan mata kuliah sosiologi gender serta mata kuliah gender dan pendidikan. Selain itu hasil penelitian dapat menggambarkan sejauhmana dinamika kesetaraan gender telah tercapai, sebagai hasil usaha dari kebijakan dan program Pengarus Utamaan Gender yang telah diimplementasikan berbagai pihak pemerhati dan aktivis yang sensitive gender, termasuk pemerintah, ormas, LSM dan Perguruan Tinggi. Dengan demikian hasil penelitian ini menambah konsep-konsep tentang kesetaraan gender yang ada di masyarakat.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Menjadi informasi bagi pemda Kabupaten Sleman DIY tentang pelaksanaan implementasi Pengarus Utamaan Gender (PUG) di lingkungannya, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan pemda dalam membuat kebijakan-kebijakan ke depan yang menuju masyarakat adil gender.

c. Manfaat Bagi lembaga Penelitian

Menambah informasi khususnya bagi pusat studi wanita dalam mengkaji permasalahan gender khususnya Pengarus Utamaan Gender (PUG) dan analisis gender

D. KAJIAN PUSTAKA

1. Memahami Konsep Gender

Untuk memahami konsep gender harus dibedakan kata gender dengan kata seks (jenis kelamin). Pengertian jenis kelamin merupakan pensifatan atau pembagian dua jenis kelamin manusia yang ditentukan secara biologis yang melekat pada jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa manusia jenis laki-laki adalah manusia yang memiliki atau bersifat antara lain memiliki penis, jakala (kala menjing) dan memproduksi sperma. Sedang perempuan memiliki alat reproduksi seperti rahim, memproduksi telur, memiliki vagina saluran untuk melahirkan, mempunyai alat menyusui. Alat-alat tersebut secara biologis melekat pada manusia jenis perempuan dan laki-laki selamanya. Artinya secara biologis alat tersebut tidak bisa dipertukarkan antara alat biologis yang melekat pada manusia laki-laki dan perempuan. Secara permanen tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis atau sering disebut sebagai ketentuan tuhan atau kodrat (trisakti dan Sugiarti, 2006).

Adapun konsep gender adalah suatu sifat yang melekat pada kaum laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial maupun kultural. Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, emosional, cantik dan keibuan. Sementara laki-laki dianggap kuat, rasional, perkasa. Perubahan ciri dari sifat-sifat itu dapat terjadi dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat lain, dari kelas sosial ke kelas sosial lainnya. Bisa saja di suatu suku tertentu perempuan pedesaan dianggap lebih kuat dan mengatur keputusan-keputusan keluarga. Sementara pada beberapa dekade laki-laki di Jawa ataupun di Asia dianggap lebih berkuasa dibanding perempuan. Jadi sifat yang melekat pada gender tidak tetap tetapi bergantung pada suatu budaya masyarakat.

Semua hal yang dapat dipertukarkan antara sifat perempuan dan laki-laki yang bisa berubah dari waktu ke waktu serta berbeda dari tempat ke tempat lainnya, maupun berbeda dari suatu kelas ke kelas yang lain, itulah yang dikenal dengan konsep gender.

Sejarah perbedaan gender (gender differences) antara manusia jenis laki-laki dan perempuan terjadi melalui proses yang sangat panjang. Oleh karena itu terbentuknya perbedaan-perbedaan gender dikarenakan oleh banyak hal, diantaranya dibentuk, disosialisasikan, diperkuat bahkan dikonstruksikan secara sosial dan kultural, melalui ajaran agama maupun negara. Melalui proses panjang pula, sosialisasi tentang gender tersebut akhirnya dianggap ketentuan yang kuasa (Tuhan). Seolah-olah bersifat biologis yang tidak bisa diubah lagi, tidak bisa dipertukarkan, sehingga perbedaan-perbedaan gender dianggap dan dipahami sebagai kodrat laki-laki dan kodrat perempuan.

2. Teknik Analisis Model Gender Analysis Pathway (GAP)

Metode GAP merupakan metode yang telah banyak dikembangkan di Indonesia terutama dalam proses perencanaan program-program yang responsif gender.

a. Pengertian

Metode GAP adalah metode analisis untuk mengetahui kesenjangan gender dengan melihat aspek akses, peran, manfaat dan kontrol yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam program-program pembangunan yang menjadi pokok bahasan, mulai dari aspek kebijakan sampai dengan monitoring dan evaluasi.

Metode GAP dapat memberikan sumbangan pikiran dalam menetapkan program pembangunan, meningkatkan wawasan pentingnya efektivitas dan efisiensi, serta kelayakan perencanaan pembangunan yang selalu memperhitungkan kepentingan perempuan dan laki-laki.

Dengan demikian metode GAP dapat digunakan oleh para perencana dan pelaksana program pembangunan di tingkat pusat dan daerah, untuk menetapkan prioritas permasalahan dan sasaran serta solusi atau intervensi yang diperlukan.

Rasionalisasi penggunaan GAP sebenarnya berawal dari:

- 1) GBHN dan Propenas yang mengisyaratkan untuk lebih meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelaksana program Pembangunan Nasional, terutama dalam mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender (KKG).
- 2) Falsafah KKG pada dasarnya sudah mulai diamanatkan sejak UUD '45, di mana tanpa membedakan warga Negara, apakah laki-laki atau perempuan. Atas dasar itu kesenjangan gender harus menjadi pertimbangan untuk dihindari dan dipecahkan melalui kebijakan perencanaan dan pemantauan.
- 3) Metode GAP merupakan metode yang sudah diujicobakan oleh Bappenas yang ternyata dapat membantu para perencana dan pelaksana program pembangunan dalam melaksanakan amanat di atas.

b. Alur Kerja Analisis Gender

1) Tahap I: Analisis Kebijakan yang Responsif Gender

Tahap pertama yang harus dilakukan adalah melakukan Analisis Kebijakan Responsif Gender. Tahap ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan pembangunan yang ada dan menggunakan data pembuka wawasan yang dipilah menurut jenis kelamin, untuk selanjutnya mengidentifikasi kesenjangan gender (*gender gap*) dan permasalahan gender (*gender issues*)

Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

- a) Identifikasi tujuan dan/atau sasaran kebijakan/program/proyekl kegiatan pembangunan yang ada saat ini.
- b) Sajikan data kuantitatif dan/atau kualitatif yang terpilah menurut jenis kelamin sebagai data pembuka wawasan
- c) Analisis *sumber* terjadinya dan/atau factor-faktor penyebab terjadinya kesenjangan gender (*gender gap*)
- d) Identifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*)

2) Tahap II: Formulasi Kebijakan Responsif Gender

Dalam tahap kedua, kebijakan/program/proyek kegiatan yang sudah dianalisis,

kemudian dirumuskan kembali sehingga responsive gender. Disamping itu, untuk mengetahui apakah kebijakan baru sudah responsive gender maka dibuat indicator gender.

Tahap II mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Rumuskan kembali kebijakan/program/proyek/kegiatan pembangunan yang baku yang responsive gender
- b) Identifikasi indicator gender

3) Tahap III: Rencana Aksi Responsif Gender

Tahap ketiga merupakan merupakan tahap untuk menyusun rencana kegiatan yang sudah responsif gender. Langkah-langkah dalam tahap ini adalah:

- a) Penyusunan rencana aksi
- b) Identifikasi sasaran-sasaran (kuantitatif dan/atau kualitatif) untuk setiap rencana aksi.

4) Tahap IV: Pelaksanaan Kegiatan

Tahap keempat merupakan tahap pelaksanaan kegiatan yang sudah responsive gender

5) Tahap V: Monitoring dan Evaluasi:

Monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan untuk semua tahap, baik mulai dari tahap I sampai dengan tahap IV.

3. Teknik Analisis Model PROBA (*Problem Based Approach*) atau Analisis “Berbasis Masalah”

Langkah-langkah (alur kerja analisis)

a) Analisis Masalah Gender

Analisis masalah gender merupakan rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menetapkan/merumuskan masalah gender yang terjadi di tiap instansi atau wilayah.

Beberapa tahap dalam analisis masalah gender adalah:

1) Identifikasi data terpilah

Identifikasi data terpilah yang menunjukkan kesenjangan gender yang terjadi di instansi dan atau wilayah masing-masing. Data bias dalam bentuk kuantitatif maupun kualitatif

2) Penetapan masalah kesenjangan gender

Dari data terpilih yang menunjukkan kesenjangan gender tersebut ditetapkan masalah gender dalam bentuk kalimat yang jelas

3) Identifikasi faktor penyebab

Setelah masalah kesenjangan gender dirumuskan, cari faktor penyebab kesenjangan tersebut. Faktor penyebab kesenjangan dapat dilihat dari beberapa faktor yang menimbulkan bias atau berbagai bentuk diskriminasi antara laki-laki dan perempuan:

- i. Faktor sosial/budaya
- ii. Faktor agama
- iii. Faktor adat istiadat/budaya
- iv. Faktor Ekonomi
- v. Faktor peraturan perundang-undangan
- vi. Faktor kebijakan
- vii. Lain-lain

Identifikasi juga faktor ketidakseimbangan gender yang dilihat dari aspek akses, peran, control, dan manfaat

b) Telaah Kebijakan

Telaahan kebijakan/program/kegiatan merupakan kegiatan menelaah kembali kebijakan/ program/kegiatan yang ada di dokumen perencanaan pembangunan

Tahapan yang perlu dilakukan adalah

1) Analisis kebijakan

Tulis kembali bunyi kebijakan/program/kegiatan yang tertulis dalam Propenas/Renstra/Repeta untuk tingkat pusat dan *Propeda/Renstradal* Repetada untuk tingkat daerah

Kebijakan/Program/kegiatan yang diambil dan ditulis hendaknya berkaitan dengan data kesenjangan gender pada langkah pertama

2) Klasifikasi Kebijakan

Klasifikasikan kebijakan/program/kegiatan tersebut dalam klasifikasi netral bias atau responsive gender

3) Penetapan kebijakan/Program/Kegiatan yang Strategis

Setelah kebijakan/Program/Kegiatan dituliskan pilih program/kegiatan strategis,

lanjutkan dengan menulis kebijakan/program/kegiatan yang ada di dokumen pembangunan. kebijakanl tujuan dari perencanaan

c) Formulasi Kebijakan Baru

1) Formulasi Kebijakan Baru Responsid Gender

Dari kebijakan/program/kegiatan strategis yang ternyata bias dan netral gender reformulasikan kebijakan/program/kegiatan baru yang responsive gender. Dari kebijakan baru yang Responsif Gender selanjutnya tuliskan tujuan baru yang responsive gender. Bandingkan dengan tujuan yang lama

2) Program/Kegiatan/Pokok yang Responsif Gender

Tuliskan dan pilih program dan kegiatan pokok yang responsive gender berdasarkan tujuan baru yang akan dicapai.

d) Penyusunan Rencana Aksi & Kegiatan Intervensi

Setelah program pokok ditetapkan selanjunya ditentukan rencana aksi dan kegiatan intervensi yang perlu dilakukan. Di dalam uraian kegiatan intervensi, tetapkan pula target/sasaran pelaksanaan dan waktu pelaksanaan.

e) Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan langkah-langkah analisis dan mengadakan perbaikan apabila diperlukan. Selanjutnya laporan Monitoring evaluasi menjadi bahan masukan untuk analisis berikutnya.

1) Penyusunan Indikator Kerja

Sebelum melakukan monitoring dan evaluasi perlu ditentukan indicator atau alat monitong dan evaluasi yang akan digunakan

2) Pembentukan Gender Focal Point (GFP) dan pengembangan kelompok kerja (Pokja) PUG.

PUG dapat dilaksanakan dengan lancer kalau ada sekelompok orang yang senantiasa bekerja dengan penuh perhatian untuk melihat perkembangan pelaksanaan PUG dan membantu mengatasi masalah yang terjadi. Anggota GFP adalah mereka yang pernah mendapatkan informasi tentang gender baik melalui jalur formal maupun informal. Sedangkan anggota pokja diambil dari anggota GFP yang terpilih.

3) Penyusunan Mekanisme Operasional

Ini merupakan tahap akhir analisis PROBA. Pada tahap ini disusun mekanisme operasional secara lebih rinci dan detail di setiap usulan kegiatan intervensi yang telah disusun sebelumnya. Hasilnya akan dijadikan juklak dan juknis pelaksanaan kegiatan.

E. METODE PENELITIAN

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Pemerintahan Kabupaten Sleman DIY. Alasan peneliti memilih tempat penelitian ini karena ingin melihat dan menganalisis data statistic tentang keberadaan gender di Kabupaten Sleman. Sebagai kabupaten yang memiliki cukup banyak Perguruan tinggi yang ternama dan banyaknya mahasiswa yang bertempat tinggal di daerah Sleman, maka data yang ada akan menunjukkan kesetaraan gender. Selain itu pemerintahan Kabupaten sleman siap sudah kerap melakukan kerja sama dengan Perguruan Tinggi yang ada diwilayahnya, sehingga Pemda Sleman seyogianya sudah sensitif gender.

2. Subyek Penelitian

Penelitian ini menggunakan data sekunder dari data-data statistic tentang kondisi aparat Pemerintahan Kabupaten Sleman: kependudukan yang meliputi ekonomi, tingkat partisipasi angkatan kerja, pengangguran dan aspek sosial yang meliputi aspek pendidikan dan aspek kesehatan. Selain itu akan dilakukan wawancara dengan orang-orang kunci di Pemerintahan Kabupaten Sleman untuk memperkuat data statistik tersebut terutama dalam mendukung analisis gender.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini digunakan dengan teknik:

- a) Dokumentasi yaitu berupa data-data statistic yang berkaitan dengan aspek aparat pemerintahan, aspek kependudukan dan aspek sosial
- b) Wawancara yang akan dilakukan pada orang-orang kunci yang ada di kantor pemerintahan seperti kantor Bappeda, statistic untuk menanyakan tentang hal-hal yang menyebabkan bila terjadi ketimpangan gender atau kesetaraan gender

4. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis Model Gender Analysis Pathway (GAP) tahap I yaitu:

Langkah-langkah dalam tahap ini meliputi:

- a) Identifikasi tujuan dan/atau sasaran data
- b) Menyajikan data kuantitatif yang terpilah laki-laki dan perempuan
- c) Menganalisis data dan mengidentifikasi kesenjangan gender (gender GAP)
- d) Identifikasi masalah-masalah gender (*gender issues*)

F. PEMBIAYAAN DAN JADWAL PENELITIAN

G. PERSONALIA PENELITIAN

No	Nama dan Jabatan dalam Penelitian	Bidang keahlian	Instansi	Alokasi waktu (jam/mg)
1.	Prof. Dr. Farida Hanum, M.Si (Ketua)	Sosiologi Gender	UNY	15 Jam
2.	Lutfi Wibawa, M.Pd (Anggota)	Pendidikan Luar Sekolah	UNY	12 Jam

Mahasiswa yang terlibat:

No	Nama	NIM
1.	Supriyanto	06110241007
2	Nopita Sitompul	06110241002

H. DAFTAR PUSTAKA

Berninghousen, J. dan Kertan B. 1992. **Forging New: Paths: Feminist Social Methodology And Rural Women In Jawa**. London: Zend Book Ltd.

Burr, dkk. 1977. "An Emperical Test of Rodman's Theory of Reseources in Culture Conter". *Journal of marriage And Family*

Davis, Kathy, Leijendar, Monique, Oldersma, Tantine. 1991. **The Gender of Power** London Sage Publications.

Farida Hanum, 2007. **Diktat Sosiologi Gender**. FIP UNY

Geertz C. 1973. **The Interpretation of Culture: Selected Essay**. London: Huchinson and Co Publisher

Gramsci A. 1971. **Selection from The Prison Note Books**. London: Lawrence and Wishort.

- Ismu, Gunawan. 2001. **Hak Asasi Manusia Kaum Perempuan Langkah Demi Langkah**. Jakarta: LBH Apik dan Pustaka Sinar Harapan.
- Keeler. 1987. **Javanese Shadow Plays Javanese selves**. Princeton NJ: Princeton University Press.
- Maynard M. 1985. **House Worker and Their Work in Rosemary Deem and Graeme Salaman (eds) Work, Culture, and Society**. Philadelphia: Open University Press
- Marrison, Kenneth. 1997. **Marx, Durkheim, Weber: Foundation of Modern Social Thought**. London: Sage Publication.
- MENPPRI. 2009, **Panduan Pemantauan Dan Penilaian Pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional**, Kem
- Mies, M. 1985. **Patriarchy and Accumulation a World Scale: Women in The IDL**. London: Zed Books Ltd.
- Ogburn dan Nimkoff. 1956. **A Hand Book of Sociology**. London: Roudledge and Kegan Panl. Ltd
- Parson T dan Bales, RF. 1951. **Family: Socialization and Interactive Process**. London: Routledge & Kegan Powl.
- Ritzer, George. 1992. **Sociological Theory Mc Graw Hill Inc**.
- Siti Hariti Sastriyani. 2010. **Metode Gender Analysis Pathway (GAP), Makalah Training “Anggaran responsive Gender” Kerjasama BPPM DIY dengan GTZ De CGG DIY tanggal 6-8 April 2010**.
- Staam, Liesa and Ryff, Carol D. 1984. **Social Power and Influence of Women**. Colorado: Westview Press. Inc
- Trisakti H. dan Sugiharti. 2006. **Konsep dan Teknik Penelitian Gender**. Malang UMM Press.
- Weeaning, B. 1989. **The Ideology of Mother Hood**. Sedney: George Allen & Unwin